



SALINAN

BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong dipandang belum efektif sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012;
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG  
dan  
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SORONG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 32) yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong :

- a. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 11); dan
- b. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2014 Nomor 2).

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang

- berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
    - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
    - a. Kepala;
    - b. Sekretariat terdiri dari:
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
      1. Sub Bidang Agama, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
      2. Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
    - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
      1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Tata Ruang; dan
      2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
    - e. Bidang Ekonomi dan Usaha Daerah terdiri dari :
      1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan dan Pertambangan; dan
      2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
      1. Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; dan
      2. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
    - g. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :
      1. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik; dan
      2. Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan.
  - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.
  - (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perencanaan program pengawasan;
    - b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
    - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 24 Juni 2015

BUPATI SORONG,  
ttd  
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 7

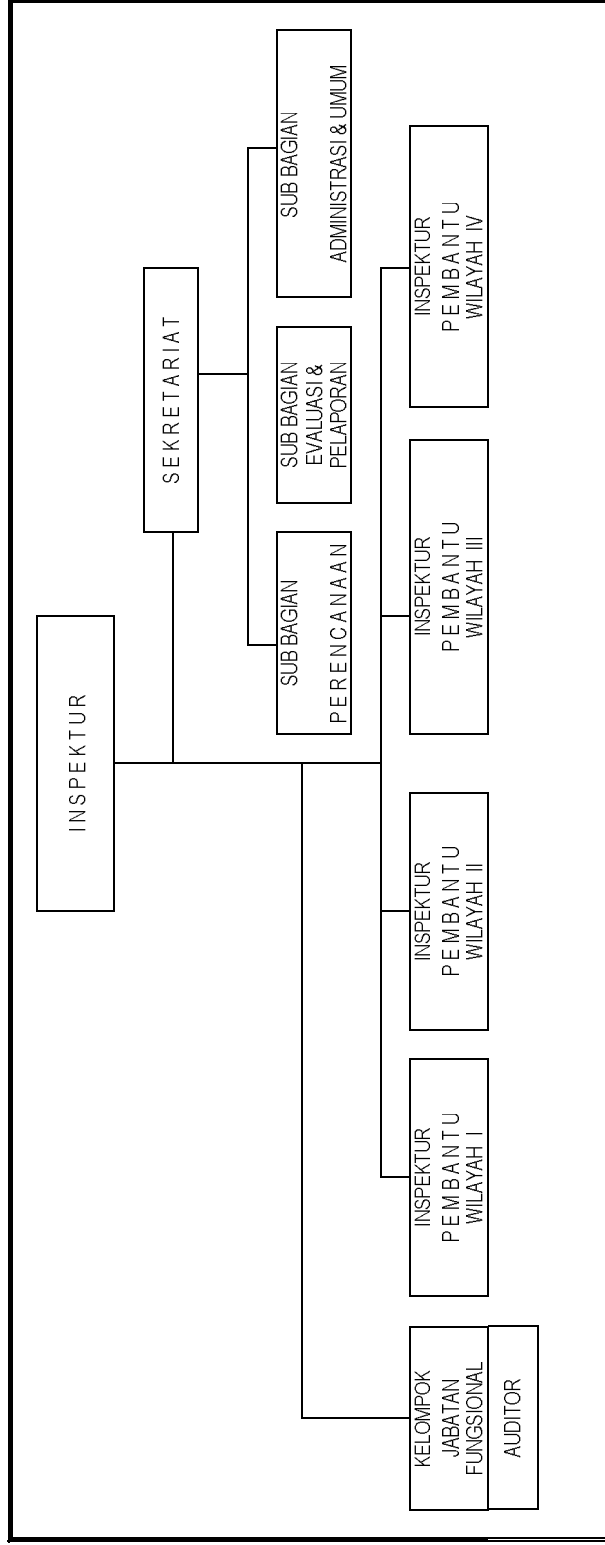
Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT :  
( 7 / 2015 )

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TANGGAL 24 JUNI 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN SORONG



Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

BUPATI SORONG,  
ttd  
STEPANUS MALAK



**LODEWIEK KALAMI**

1 DAERAH KABUPATEN SORONG

NOBUK / 1AHUN 2015

TANGGAL 24 JUNI 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SORONG

